

INOVASI STRATEGI PENINGKATAN SEMANGAT BELA NEGARA DAN FUNGSI KEWASPADAAN DINI DAERAH PADA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN SUMBAWA BARAT

Satriawan¹, Hardian Reza Dharmayanda², Muhammad Hidayatullah³

Program Studi Magister Manajemen Inovasi Universitas Teknologi Sumbawa
Jalan Raya Olat Maras, Moyo Hulu, Batu Alang, Sumbawa Besar, Nusa Tenggara Barat
satreachelsea23@gmail.com¹ dharmayanda@gmail.com² muhammad.hidayatullah@uts.ac.id³

Abstrak

Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bidang Ideologi dan Karakter Bangsa - Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat, dipandang belum memberikan dampak yang maksimal dalam upaya meningkatkan kesadaran bela negara bagi masyarakat desa secara merata, baik disebabkan oleh karena kebijakan prioritas pembangunan daerah maupun minimnya kreatifitas dan inovasi dari aparat yang menangani program dan kegiatan di maksud. Kurangnya personil di Bidang kewaspadaan nasional juga menjadi salah satu factor penghambat didalam pemantauan dan upaya deteksi dini berbagai gejala dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan yang datangnya dari luar dalam rangka mengganggu tegaknya ideology bangsa, yakni ideology Pancasila. Mendalami dan memahami kondisi ini, peneliti mencoba melakukan penelitian dengan metode kualitatif, dengan mewawancarai berbagai pihak, dalam rangka menemukan apa yang menjadi harapan dan kendala dalam pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dimaksud. Hasil dari penelitian ini adalah ditetapkan inovasi dalam mempercepat pelaksanaan tugas dan fungsi dimaksud dengan terbentuknya Kader Bela Negara Desa (KBNDes). Kebijakan ini diterapkan dalam rangka bersinergi dengan desa untuk mempercepat peningkatan semangat bela negara dan cinta tanah air dengan dukungan dari pemerintah Desa dalam hal penganggaran melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja desa (APBDes). Selain itu, tentunya kebijakan ini akan mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bidang Kewaspadaan Nasional dalam memperoleh informasi tentang isu-isu dan konflik daerah yang ada di desa yang berpotensi menjadi ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) yang tepat waktu, mengingat Kader Bela Negara Desa juga di tugaskan sebagai informan bagi Bidang Kewaspadaan Nasional.

Kata Kunci: Inovasi, Cinta Tanah Air, Bela Negara, Desa

Abstract

The implementation of the main tasks and functions of the Ideology and National Character Sector - the National Unity and Political Agency of West Sumbawa Regency, is seen as not having the maximum impact in an effort to increase awareness of defending the state for the village community equally, both due to regional development priority policies and the lack of creativity and innovation from the apparatus that handles the programs and activities in the intent. The lack of personnel in the field of national vigilance is also one of the inhibiting factors in monitoring and early detection of various symptoms of threats, disturbances, obstacles and challenges that come from outside in order to disrupt the upholding of the nation's ideology, namely the ideology of Pancasila. Exploring and understanding this condition, the researcher tries to conduct research with qualitative methods, by interviewing various parties, in order to find out what are the

expectations and obstacles in carrying out the duties and responsibilities in question. The result of this research is that innovation is determined in accelerating the implementation of the tasks and functions referred to by the formation of the Village State Defense Cadre (KBNDes). This policy is implemented in order to synergize with villages to accelerate the increase in the spirit of defending the country and love for the homeland with support from the Village government in terms of budgeting through the Village Revenue and Expenditure Budget (APBDes). In addition, of course, this policy will support the implementation of the duties and functions of the National Vigilance Sector in obtaining information about issues and regional conflicts in the village that have the potential to become threats, disturbances, obstacles and challenges (AGHT) in a timely manner, considering the National Defense Cadres The village is also assigned as an informant for the National Vigilance Sector.

Keywords: *Innovation, Love for the Homeland, State Defense, Village.*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang luas, terbentang dari sabang sampai merauke. Sebagai salah satu negara besar, luas dan dengan kekayaan sumber daya alamnya, maka sudah sepantasnya Indonesia melengkapi dirinya dengan alat alat negara dalam ketahanan negara. Ketahanan Negara adalah upaya pemerintah dan masyarakatnya dalam suatu negara dalam upaya mempertahankan diri dari berbagai ancaman dan tantangan. Bangsa berkedaulatan mempunyai cara untuk melindungi, menjaga, dan mempertahankan keutuhan, persatuan dan kesatuan, terhadap segala bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT) baik dari dalam maupun dari luar adalah dengan pertahanan negara. Membangun sistem pertahanan negara dengan membentuk sistem pertahanan yang melibatkan semua pihak yang biasa disebut pertahanan bersifat semesta, yakni dengan keterlibatan warga negara dan sumber daya lainnya, yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman, baik ancaman yang datangnya dari dalam negeri maupun gangguan yang sifatnya merusak dari luar negeri. (Modul_li_Implementasi_Bela_Negara_BadanDiklat_Kemenhan_2018.pdf n.d.)

Pertahanan negara bersifat semesta, yakni proses penyelenggaraan didasar pada kesadaran akan hak dan kewajiban setiap warga negara dan keyakinan kepada potensi diri masing-masing, disusun berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, kesejahteraan umum, hak asasi manusia, lingkungan hidup, hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan-

kebiasaan internasional, dan prinsip hidup berdampingan secara damai dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara negara maritim dan kepulauan yang tersebar dari sabang sampai merauke. (Undang-undangno23_Setneg RI, 2019). Melihat perkembangan saat ini, Pembinaan Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan, kembali harus semakin masif dilaksanakan. Mengingat, saat ini kita memasuki era industri 4.0, yang mana di era ini beralihnya ke sistem digital dalam berbagai aspek kehidupan, arus informasi yang semakin mudah dan cepat didapatkan, mudahnya masyarakat kita umumnya anak anak remaja khususnya terpengaruh dengan berbagai budaya luar, yang terakses secara langsung sehingga generasi muda kecenderungan dalam berfikir dan bertindak secara simple dan skeptis tanpa memperhatikan etika dan budaya bangsa kita yang ketimuran. Banyaknya muncul berita berita bohong (hoax) yang dengan mudahnya mempercayai itu tanpa di cari kebenaran berita di maksud. 2 Universitas Teknologi Sumbawa Kabupaten Sumbawa Barat merupakan kabupaten baru, hasil pemekaran dari Kabupaten induk yakni Kabupaten Sumbawa dan telah di sahkan pembentukannya di tahun 2003, dengan berbatasan langsung dengan samudra india dan selat alas di sebelah barat dan selatannya, dan sebelah timur dan utara berbatasan dengan Kabupaten induk.(Undang-undangno.30. Mahfud MD, 2003)

Kondisi alam geografis inilah yang setidaknya menyadarkan kita untuk menerapkan kewaspadaan dini, mengingat posisi strategis daerah Sumbawa Barat yang berbatasan langsung dengan perairan internasional yang sedikit tidak akan mempermudah masuknya ancaman dan gangguan ketika sewaktu-waktu terjadi permasalahan antarnegara atau kesalahpahaman yang

menimbulkan ketegangan antar negara. Melihat kondisi geografis inilah tentunya dari sisi pembinaan kesadaran bela negara harus tertanam dan selalu di tersosialisasikan dengan baik secara terus-menerus kepada seluruh lapisan masyarakat, mengingat kesadaran akan semangat bela negara dan kewaspadaan dini akan sangat di butuhkan dalam upaya menjaga kedaulatan bangsa dan negara dari sisi masyarakat desa. Upaya pembinaan kesadaran bela negara untuk masyarakat desa secara langsung dan keterlibatan desa dalam hal ini pemerintah desa melalui penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) inilah yang menjadi keharusan dalam kontek membangun pemahaman masyarakat desa, dalam kontek cinta tanah air dan menjaga kedaulatan negara, yang tentunya berkolaborasi dengan Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat.(Budhi Pamungkas Gautama et al. 2020).

Salah satu upaya dan strategi dalam tugas dan tanggungjawab di Bidang Ideologi dan wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat adalah dengan memberikan pemahaman ideologi Pancasila kepada warga baik berupa sosialisasi oleh Tim Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan secara langsung di tengah tengah masyarakat juga dengan mengadakan seminar dan diskusi tentang Ideologi Pancasila dengan mendatangkan Narasumber yang ahli di bidangnya yakni dari Unsur Kodim 1628 Sumbawa Barat, Kantor Kementerian Agama, dari Badan Kesbangpol Provinsi Nusa Tenggara Barat. (BagianHukum_SetdaKSB_PerbupT upoksi, 2017)

Melihat dan mengamati tentang semangat pembinaan dan

pemahaman Ideologi Pancasila di Bidang Ideologi Pancasila dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat kepada seluruh unsur masyarakat sebagai landasan dasar jiwa dan pegangan dalam berbangsa dan bernegara, maka Penulis tertarik untuk meneliti dan menelusuri lebih jauh tentang Bagaimana strategi Pemerintah Daerah melalui Badan Kesbangpol dalam meningkatkan semangat Bela Negara, Bagaimana implikasinya terhadap pemahaman Ideologi Pancasila dan Strategi dalam Mengelola Isu dan Konflik Daerah. 3 Universitas Teknologi Sumbawa Pembinaan ideology Pancasila, kesadaran bela negara dan fungsi kewaspadaan dini daerah inilah yang harus terus-menerus dilakukan oleh Pemerintah melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, ditengah keterbatasan anggaran dan prioritas pembangunan yang di arahkan ke sektor lain, menjadi tantangan bagi penulis untuk melakukan strategi dan inovasi guna mempercepat penyebaran informasi dan materi-materi kesadaran bela negara dengan tentunya mengandalkan pihak-pihak lain yang berkepentingan yakni Pemerintah desa dengan penganggaran melalui dana desa.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah bentuk penelitian yang dilakukan berdasarkan atau sesuai dengan permasalahan yang diamati (Moleong, 2007). Pendapat lainnya mengungkapkan bahwa penelitian yang menggunakan prosedur data data deskriptif berupa kata kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku yang biasa di amati. Penelitian Kualitatif biasanya di gunakan di dalam ilmu-ilmu sosial yang berkaitan dengan perilaku manusia dalam hal interaksi

sosialnya, dan kecenderungannya selalu berkembang yang tentunya dipengaruhi oleh argumentasi-argumentasi tertentu lainnya (Sudrajat, 2005).

Proses penelitian lebih penting dari sekedar hasil merupakan ciri dari penelitian kualitatif ini. Proses penelitian menjadi hal harus benar-benar diperhatikan di dalam penelitian kualitatif ini, dimana peneliti harus mampu menempatkan dirinya pada posisi seobjektif mungkin mengingat posisinya sebagai pengumpul instrument sehingga data data yang terkumpul mampu untuk dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Moleong dalam tulisannya menjelaskan tentang karakteristik dari penelitian kualitatif, yaitu ; 1. Penelitian yang alamiah dan ditampilkan secara utuh. 2. Manusia/peneliti sebagai alat utama pengumpulan data. 3. Metode yang diterapkan adalah metode kualitatif. 4. Penganalisaan data secara induktif sesuai dengan fakta lapangan. 5. Menuju pada arah teori dasar, yakni menuju ke arah penyusunan teori berdasarkan data temuan lapangan. 6. Data data yang di kumpulkan berupa deskriptif atau kata-kata gambar dan bukan angka-angka. 7. Focus pada alur dan proses daripada hasil. 8. Batasan masalah di tentukan oleh focus masalah. 9. Penentuan kriteria khusus untuk keaslian data. (punya versi lain tentang validitas, reliabilitas dan obyektivitas). 10. Konsep dan desain belum final dan masih dalam konsep sementara. Desain penelitian terus berkembang sesuai dengan kondisi lapangan. 11. Hasil dan kesimpulan penelitian dibahas dan disepakati bersama (hasil penelitian dirundingkan dan disepakati bersama antar peneliti dengan sumber data).

Suatu upaya untuk mendapatkan kebenaran adalah hakekat dari penelitian atau untuk

lebih membenarkan kebenaran yang ada. Usaha untuk mengejar kebenaran inilah yang dilakukan oleh para filosof, peneliti, maupun oleh para praktisi melalui model-model tertentu. Model tersebut biasanya dikenal dengan paradigma. Bogdan dan Biklen (1982:32) menjelaskan paradigma adalah sejumlah asumsi yang di pegang bersama secara longgar proposisi atau konsep yang dipegang bersama mengarahkan cara berfikir dan penelitian. Penelitian kualitatif menempatkan teori pada garis yang digunakan di bidang antropologi dan sosiologi yang mirip dengan istilah paradigma (Ritzer, dalam Bogdan & Biklen, 1982). Paradigma adalah kumpulan tentang asumsi dan pendapat, konsep, atau proposisi yang secara logis dipakai peneliti. Peneliti yang bagus menyadari tentang dasar teori mereka dan menggunakannya untuk membantu mengumpulkan dan menganalisis data.

Data adalah suatu kelengkapan yang melekat pada obyek tertentu berfungsi sebagai informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, dan diperoleh melalui instrument atau metode pengumpulan data. Data kualitatif bisa berbentuk kalimat pernyataan, uraian, deskripsi yang mengandung suatu makna dan nilai (values) tertentu yang diperoleh melalui instrumen penggalan data seperti dokumentasi, wawancara dan sebagainya (Hardiansyah, 2013). Adapun data yang diperoleh dalam penelitian ini berupa jawaban informan terkait pertanyaan tentang peran dan indikator keberhasilan Kader Bela Negara Desa sebagai inovasi peningkatan semangat Bela Negara dalam konteks Pemahaman Ideologi Pancasila di Kabupaten Sumbawa Barat.

Data yang diperoleh langsung dari sumber utama adalah data primer yang digunakan oleh peneliti di penelitian ini. Di dalam penelitian

ini sumber data utama yakni data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informannya atau orang yang bersangkutan secara langsung, yang mana informannya di sini dari orang-orang yang berpotensi untuk bisa memberikan informasi-informasi yang kita butuhkan. Pemilihan sumber data di dalam penelitian ini dengan cara purposive sampling yaitu sumber-sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2013). Untuk mendapatkan data yang komprehensif maka informan juga melibatkan tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh adat, selain juga melibatkan pejabat-pejabat di Lingkup Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, seperti Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, Asisten Pemerintahan Umum dan Kesejahteraan rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

Data-data yang diperoleh dari dokumen-dokumen dan foto-foto yang dapat digunakan sebagai data pelengkap data utama atau data primer disebut sebagai data sekunder. Dengan kata lain data sekunder adalah data yang diperoleh dengan kondisi sudah jadi dan telah terpublikasikan. Sumber data sekunder di dalam penelitian ini adalah data yang telah diolah dan di publikasikan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat, berupa aturan-aturan yang melekat dan dokumentasi kegiatan dan lain sebagainya.

Di dalam penelitian kualitatif proses pengumpulan data dilakukan oleh peneliti sendiri selaku instrument utama (human instrument). Hubungan kerja antar penulis dan dengan subyek penelitiannya melalui kegiatan observasi partisipan, wawancara yang mendetail dengan informan atau subyek penelitian, pengumpulan dokumen dengan penelaahan terhadap berbagai

referensi-referensi yang relevan dan sesuai dengan focus penelitian (Idrus, 2007). Teknik pengumpulan data di dalam penelitian kualitatif ini adalah dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipan mengingat peneliti adalah salah satu anggota dari Tim Pelaksana Kegiatan Sosialisasi Bimbingan Teknis Bela Negara di Kabupaten Sumbawa Barat. Observasi sendiri ada 3 macam yakni, observasi partisipan, observasi terstruktur, dan observasi tersamar. Wawancara adalah metode pengumpulan data dengan Tanya jawab dan berhadapan secara langsung dengan subyek penelitian dengan sistematis dan berlandaskan pada tujuan-tujuan penelitian. Metode wawancara ada 3 metode, yakni wawancara bebas, wawancara terstruktur, dan wawancara bebas dan terstruktur. (Herdiansyah, 2013)

Di dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara bebas terstruktur, berupa kombinasi keduanya dimana pewawancara membawa pedoman yang merupakan garis besar dari hal-hal yang di tanyakan. Sebagai instrumennya adalah interview guidance atau pedoman wawancara. Dengan demikian wawancara dilakukan dengan pertanyaan yang mengarah pada kedalaman informasi, serta dilakukan tidak secara formal terstruktur. Dalam pengumpulan data berupa wawancara ini, penulis ingin menggali informasi yang terkait dengan peran dan indikator keberhasilan Penerapan Kebijakan Kader Bela Negara Desa (KBNDes) mendukung upaya dan strategi peningkatan semangat bela negara dan konsep pemahaman Wawasan Kebangsaan secara umum selaku tufoksi utama Bidang Iwasbang Badan Kesatuan Bangsa dan Politik kabupaten Sumbawa Barat. Dokumentasi merupakan catatan

peristiwa yang sudah dilakukan dan telah berlalu. Dokumen bisa berbentuk gambar, tulisan, atau karya-karya monumental. Dalam penelitian ini diperoleh dokumen dalam bentuk tulisan berupa aturan-aturan resmi dan kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Sumbawa Barat terkait Kader Bela Negara Desa (KBNDes).

Dalam proses memperoleh informasi dan data dalam penelitian kualitatif ada pihak-pihak yang akan memberikan informasi berkaitan dengan obyek penelitian yang disebut sebagai informan. Orang atau pelaku yang sangat dibutuhkan untuk memberikan informasi-informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian serta merupakan orang-orang yang benar-benar mengetahui permasalahan yang akan diteliti disebut sebagai informan. Informan tersebut antara lain adalah : 1. Asisten Pemerintahan dan Kesra 2. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, 3. Ketua MUI Kabupaten Sumbawa Barat, 4. Camat Taliwang 5. Camat Sateluk, 6. Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional 7. Kepala Bidang Pemerintahan Desa DPMD 8. Kepala Desa Tongo, dan 9. Kepala Desa Moteng 10. Kepala Desa Kalimantanong.

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kabupaten Sumbawa Barat melalui Bupati terpilihnya Bapak Dr. Ir. H. W. Musyafirin, MM dan Wakilnya Bapak Fud Syaifuddin, ST, yang merupakan periode kedua (2021-2026) memimpin Kabupaten Sumbawa Barat menetapkan Arah Kebijakan atau Visi dan Misi Pembangunannya yang tertuang di dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), dalam melaksanakan program-program

yang telah ditetapkan dan janji-janji politiknya.

Visi Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat, sebelumnya dirumuskan ke dalam tujuh isu-isu strategis pembangunan yaitu (1) isu masyarakat miskin, (2) upaya peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, (3) isu pengangguran, (4) tata kelola pemerintah daerah, (5) kemandirian dan ketahanan pangan, (6) upaya peningkatan dan pengelolaan serta promosi destinasi dan obyek pariwisata, (7) pengelolaan lebih maksimal sumber daya alam dan lingkungan hidup. Semua tujuh aspek di maksud menjadi tantangan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang akan datang.(RANHIR RPJMD 2021-2026 NEW-converted n.d.)

Upaya menjawab berbagai tantangan tersebut maka pada periode keduanya ini dicanangkanlah Visi Kabupaten Sumbawa Barat yaitu: "**Terwujudnya KSB Baik berlandaskan gotong royong**", dengan Misi:

KSB baik dalam akhlak dan daya saing sumber daya manusianya, KSB baik dalam kemandirian sosial masyarakat, KSB baik dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan public, KSB baik dalam kemandirian pangan, KSB baik dalam kemandirian ekonomi, KSB baik dalam kemantapan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup.(BAPPEDALITBANG RPJMD 2021-2026 NEW-.2021).

Dilandasi oleh nilai-nilai agama dan semangat gotong royong, mengedepankan nilai kearifan lokal, musyawarah untuk mufakat dalam pembangunan yang partisipatif dan responsif, Akan menjadi pondasi dasar dalam mengawal visi dan misi tersebut, Yang semuanya akan dituangkan di dalam dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat Periode 2021-2026.

Nilai dan makna semangat gotong-royong di dalam visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumbawa Barat : Upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan yakni dengan tetap mengamalkan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang mengandung nilai dan semangat kebersamaan, persatuan dan tolong-menolong, Upaya mendorong keikutsertaan masyarakat di dalam proses pembangunan berdaya guna dan berhasil guna sebagai sarana integrasi sosial dan moral. Pemberdayaan masyarakat, perluasan kesempatan kerja upaya peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, pengembangan sosial ekonomi wilayah dan penanggulangan kemiskinan adalah strategi yang diterapkan pemerintah untuk mencapai tujuan pembangunan.

Seperti yang di ungkapkan oleh Bupati Sumbawa Barat, pada Rapat Paripurna tentang Pengesahan Pengangkatannya dalam periode kedua, masa kepemimpinannya.

“Kita semua telah membuktikan, bahwa dengan kebersamaan dalam bingkai gotong royong, semua masalah dapat kita tuntaskan dengan segera. Gotong royong tetap akan kita jadikan instrumen utama dalam pembangunan di Kabupaten Sumbawa Barat.” Jelasnya.

Langkah strategis dalam rangka menjalankan visi dan misi pembangunannya di periode keduanya, adalah Upaya Percepatan Pengurangan angka kemiskinan, Strategi peningkatan daya saing sumberdaya manusia dan upaya peningkatan kualitas hidup. Upaya Peningkatan produktifitas perikanan dan pertanian. Strategi meningkatkan daya saing UMKM dan IKM daerah, Strategi Meningkatkan lapangan kerja dan kesempatan kerja, Upaya pemanfaatan maksimal kawasan dan destinasi unggulan daerah, Keberlanjutan upaya

pemenuhan infrastruktur dasar, Upaya keberlanjutan penuntasan STBM dan peningkatan pengelolaan lingkungan hidup bersih dan sehat. Strategi dan Penyederhanaan struktur birokrasi, Konsep Mall Pelayanan Publik dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik terpadu dan terintegrasi (*BAPPEDALITBANG_ RPJMD 2021-2026 NEW-.2021*).

Perencanaan Kinerja

Pengukuran kinerja instansi pemerintah dan penyusunan Laporan akuntabilitas instansi Pemerintah Tahun 2021 di mulai dengan tahapan awal dengan penyusunan rencana strategis Perangkat Daerah. Mengacu kepada dokumen rencana strategis perangkat daerah Badan Kesatuan dan Politik Tahun 2016-2021, terdiri dari beberapa komponen yakni : tujuan, sasaran, dan strategi pencapaian tujuan/sasaran yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan, program dan kegiatan.

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah faktor yang sangat penting dan berperan didalam menentukan pencapaian/keberhasilan atau kegagalan. Faktor ini diperlukan sebagai faktor pendukung utama strategi pilihan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan. Dari hasil analisa dan pengkajian, maka dapat dirumuskan faktor-faktor kunci keberhasilan sebagai berikut :

1. Komitmen pemerintah dengan paradigma baru pemerintahan.
2. Kesadaran dan kemauan masyarakat dalam menjunjung tinggi nilai demokrasi dan toleransi.
3. Komunikasi, interaksi sosial dan partisipasi masyarakat.
4. Dukungan dan peran serta masyarakat, Parpol/Ormas, Toga/Toma, LSM dan Perguruan Tinggi.

5. Sumberdaya yang memadai.
6. Sistem perencanaan dan penganggaran yang baik.
7. Koordinasi dan sinkronisasi yang baik,
8. Pengawasan yang efektif dan transparan.

Tujuan pada intinya merupakan cerminan dari tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah yang secara keseluruhan terjabarkan pada rincian tugas pokok dan fungsi Pejabat Eselon II,II dan IV.

Sasaran adalah upaya yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan-tujuan atau mendukung tugas inti tersebut.

Struktur, Tugas Pokok dan Fungsi

Struktur, tugas pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat, sesuai dengan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 68 Tahun 2019 terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris Badan yang membawahi Kepala Sub Bagian tertentu dan Kepala Bidang yang membawahi Kepala Sub Bidang tertentu dengan bentuk struktur organisasinya sebagai berikut : Kepala Badan, Sekretaris Badan, terdiri dari 2 Sub Bagian, yakni : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian ; dan Sub Bagian Penyusunan Program dan Keuangan.

Kepala Bidang Ideologi dan Karakter Bangsa, terdiri atas dua Sub Bidang yaitu:

Sub Bidang Ideologi Bangsa,
Sub Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama.

Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan terdiri atas dua Sub Bidang yaitu:

Subbidang Politik Dalam Negeri;
Subbidang Organisasi Kemasyarakatan;

Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik terdiri atas dua Sub Bidang yaitu: Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen;

Subbidang Penanganan Konflik.
(*BAGIANORGANISASI_SETDA_PERBUP, 2017*)

Tata Kelola Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan gambaran Anggaran dan Sumber Daya tahun 2021 yang telah dialokasikan dan dapat diketahui tingkat capaian kinerja serta kesesuaian antara program dan kegiatan yang direncanakan dengan realisasinya.

Sasaran 1 : Meningkatkan toleransi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran” Meningkatnya toleransi dalam kehidupan bermasyarakat ” adalah dengan telah terbentuknya Forum-forum/mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Sumbawa Barat yang telah terbentuk dan berjalan sejak tahun 2016 dan masih aktif hingga saat ini namun masih belum maksimal karena forum dimaksud masih sebatas tingkat Kabupaten, sementara menurut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia harus dibentuk hingga tingkat Desa/Kelurahan dengan tujuan sebagai mitra Pemerintah dalam mewujudkan sasaran yang dimaksud.

Adapun forum/mitra kerja yang dimaksud terdiri dari :

1. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
2. Tim Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (Pakem).
3. Forum Pendidikan Wawasan Kebangsaan.
4. Pembinaan Kader Bela Negara.
5. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya nilai-nilai luhur budaya bangsa melalui Sosialisasi peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-

nilai luhur budaya bangsa di Kabupaten Sumbawa Barat.

Sasaran 2 : Meningkatkan Efektivitas Pencegahan dan Penanganan Konflik di Daerah

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya efektivitas pencegahan konflik di daerah dalam mencapai target suatu kegiatan adalah dengan telah terbentuknya Forum-forum / mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat yang terdiri dari :

1. Tim Pengawasan Orang Asing (Timpora).
2. Forum Kewaspadaan Dini Daerah (FKDD).
3. Tim Penanganan konflik sosial.
4. Tim Monitoring evaluasi dan pelaporan situasi serta kondisi daerah

Sasaran 3 : Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat di Daerah.

Faktor Pendukung keberhasilan pencapaian sasaran Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat di daerah dalam mencapai target suatu kegiatan adalah dengan telah beberapa kegiatan teknis yang berkaitan langsung dengan pemilih pemula termasuk melakukan sosialisasi ke beberapa desa-desa di Kabupaten Sumbawa Barat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat.

Pencapaian indikator kinerja **Meningkatnya kualitas pendidikan politik masyarakat di daerah** dengan indikator meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pemilu di Kabupaten Sumbawa Barat, yakni Pemerintah Masih belum maksimalnya sosialisasi tentang pentingnya menggunakan hak suara pada Pilkada/Pemilu.

Program kegiatan yang mendukung sasaran Tingkat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pilkada dan pemilu yaitu

Program Pendidikan Politik Masyarakat meliputi:

Penyusunan kebijakan politik masyarakat, Sosialisasi Pilkada/Pemilu bagi Pemilih pemula, Sosialisasi peraturan perundang-undangan, Pemantauan pelaksanaan pilkada/pemilu, Verifikasi administrasi parpol, Bimbingan teknis kelembagaan bagi orpol/ormas dan LSM serta pemantauan keberadaan ormas/lsm di daerah.

Pembahasan

Analisis Kebijakan Pembangunan

Dalam pengelolaan keuangan Daerah, perencanaan dan penganggaran keuangan mengacu pada beberapa factor, yang meliputi arah kebijakan pembangunan di dalam visi dan misi kepala daerah terpilih, arah kebijakan pembangunan hasil kajian dan analisis dari isu-isu strategis dan permasalahan permasalahan daerah.

Isu-isu strategis dalam kebijakan pembangunan yang tertuang dalam penjelasan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat, yakni berkomitmen dalam menyukseskan tujuan pembangunan yang berkelanjutan / **Sustainable Development Goals (SDGs)**, Kesenjangan Pembangunan Manusia (Global Inequality Human Development), Revolusi Industri 4.0, Telaahan RPJMN 2020-2024, Tantangan Perekonomian Nasional Dan Daerah Tahun 2020-2024, Penanganan Dampak Pandemi COVID-19, Telaahan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Barat 2019-2023, Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan Isu-isu Strategis Daerah.

Kemudian, kajian yang juga mempengaruhi perencanaan penganggaran keuangan daerah adalah, Hasil dari telaahan

permasalahan-permasalahan dari masing-masing urusan pemerintahan, yakni seperti yang tercantum di dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021-2026 menjelaskan tentang Permasalahan dan isu-isu strategis daerah, yakni ;

1. Permasalahan Pembangunan Urusan Wajib Terkait Pelayanan Dasar.
2. Permasalahan Pembangunan Urusan Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar.
3. Permasalahan Pembangunan Urusan Pilihan.
4. Permasalahan Pembangunan Unsur Pendukung Urusan Pemerintahan.
5. Permasalahan Pembangunan Unsur Penunjang Urusan Pemerintahan.
6. Permasalahan Pembangunan Unsur Pengawas Urusan Pemerintahan.
7. Permasalahan Pembangunan Unsur Kewilayahan.
8. Permasalahan Pembangunan Urusan Pemerintahan Umum.

Penyelenggaraan urusan pemerintahan umum meliputi pelayanan kesatuan bangsa dan politik telah diselenggarakan dengan baik, namun demikian masih terdapat permasalahan-permasalahan sebagai berikut ; Masih perlu ditingkatkannya partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum; *Masih perlu ditingkatkannya wawasan kebangsaan masyarakat;*

Dalam semangat Pembinaan Wawasan Kebangsaan, salah satunya melalui Bimbingan Tekhnis Kesadaran Bela Negara (KBN), Sekretaris Daerah Kabupaten Sumbawa Barat, menyatakan.

“Bicara tentang bela negara memang sangat sederhana namun merupakan cerminan yang semestinya menjadi keprihatinan kita dalam mengimplementasikannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesadaran bela negara menjadi bagian penting dari strategi nasional bangsa dan negara Indonesia guna menghadapi berbagai ancaman,

gangguan, hambatan, dan tantangan (AGHT)”.

Catatan hasil telaahan yang terdapat di dalam dokumen Rencana Pembangunan (RPJMD) Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021-2026 ini lah yang menjadi tujuan dan sasaran dari arah kebijakan program dan kegiatan yang ada di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, tertuang sebagai tugas pokok dan Fungsi Bidang Ideologi dan Karakter Bangsa.

Di dalam dokumen turunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yakni Dokumen Rencana Strategis (Renstra).

Faktor-faktor kunci keberhasilan adalah faktor yang sangat penting dalam menentukan pencapaian/keberhasilan atau kegagalan. Faktor ini diperlukan sebagai faktor pendukung Bidang Ideologi dan karakter Bangsa karakter kebangsaan, permasalahan yang cantumkan adalah ; Bidang Ideologi dan Karakter Bangsa, permasalahan yang ada, yakni : Kurangnya pemahaman wawasan kebangsaan, Kader bela Negara dan Pendidikan wawasan kebangsaan yang belum maksimal dalam pembinaannya, Menurunnya jiwa patriotisme bagi generasi muda disebabkan masih banyaknya pengaruh asing, Gaya hidup masyarakat yang tidak mencerminkan rasa nasionalis kebangsaan, Adanya paham luar yang berkaitan dengan ideology. Dan isu yang berkembang adalah belum maksimalnya arti pentingnya wawasan kebangsaan.

Aktualisasi Program dan Kegiatan

Aktualisasi dalam Kegiatan dan Program di Bidang Iwasbang mengacu pada dokumen Rencana Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat sesuai hasil rumusan berupa analisa

dari berbagai faktor, maka di tetapkan Program, yakni; Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan.

Kegiatan ; Perumusan Kebijakan Teknis dan pemantapan pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Karakter Bangsa, Bela Negara, Pembauran Kebangsaan, Wawasan Kebangsaan Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan, terperinci menjadi ;

1. Bimbingan Tekhnis Kesadaran Bela Negara (KBN).
2. Sosialisasi Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PWK).
3. Sosialisasi Nilai Luhur Budaya bangsa (NLBB).
4. Sosialisasi dan Pembentukan Duta Pancasila Indonesia (DPI).
5. Koordinasi Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM).
6. Sosilasasi tentang Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).

Dengan penjelasan di atas, maka dapat dipahami bahwa focus penulis adalah Bimbingan Tekhnis Kesadaran Bela Negara (KBN), sehingga melahirkan ide dan gagasan Pembentukan Kader Bela Negara Desa (KBNDes), sebagai starategi Badan Kesatuan bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Kabupaten Sumbawa Barat dalam rangka peningkatan Semangat Bela Negara yang berimplikasi terhadap Pemahaman Ideologi dan fungsi kewaspadaan dini dalam mengelola isu dan konflik daerah.

Pernyataan Kepala Bidang Ideologi dan Karakter Kebangsaan, Bakesbangpol Provinsi NTB, saat konsultasi dan wawancara pada kamis, 19 Mei 2022, di Kantor Badan Kesbangpol Prov NTB.

“Bagus, ini Inovatif dalam rangka efisiensi dan mempercepat penyampaian materi dan Informasi (Penyampaian Materi Kebangsaan dan Info-info AGHT dalam fungsi Kewaspadaan Dini) , sebagai

perwujudan peran Bidang Iwasbang dan Wasnas di tingkat Desa dengan keberadaan Kader Bela Negara Desa ini. Saya dukung, Bagus ini,,,,,, Dalam pembinaan KBNDesa ini, nantinya, bisa,,, ada pembagian peran Bidang Iwasbang dan Wasnas, yakni Bidang Iwasbang dalam penyampaian materi tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dan Pembinaan Materi Kebangsaan lainnya dan dari Bidang Wasnas bisa ada penganggaran honor atau semacam biaya pengganti pulsa dalam penyampaian informasi, Bagus ini,“

Penerapan Kebijakan dan Inovasi Strategi

Pencanangan dan Pembentukan Kader Bela Negara di masing-masing Desa, secara umum dalam rangka mendukung dan mensukseskan program pemerintah melalui amanat Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan dalam pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara adalah untuk mentranspormasikan sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional dalam menggalang kekuatan untuk kepentingan pertahanan negara, dan inilah hajat yang tertuang di dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.

Secara dini dipersiapkan dalam menghadapi berbagai ancaman merupakan hajat yang dituangkan dengan adanya pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara.

Ancaman-ancaman yang di maksud, dapat berupa

- a. Ancaman militer;
- b. Ancaman nonmiliter; dan atau
- c. Ancaman hibrida. (Natamiharja and Artiasha 2017)

Ancaman-ancaman dimaksud dapat berupa agresi militer, serangan

terorisme, paham komunisme, separatisme, adanya pemberontakan bersenjata, bencana alam, kerusakan lingkungan, pelanggaran dan pencaplokan wilayah-wilayah perbatasan, perompakan dan pencurian potensi sumber daya alam yang berharga, penyebaran wabah penyakit atau virus mematikan, peredaran gelap dan penyalahgunaan barang-barang terlarang, serangan siber, serangan nuklir, serangan biologi, serangan kimia, atau ancaman lainnya yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa Indonesia.

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dilakukan melalui : a. Kesadaran Bela Negara; b. penataan dan peningkatan kapasitas Komponen Pendukung; c. Pembentukan komponen cadangan; d. penguatan Komponen Utama; dan e. Mobilisasi dan Demobilisasi. (Republik Indonesia 2021)

Di dalam amanat Undang-undang 23 tahun 2019 tentang pertahanan negara, bahwa warga masyarakat dan seluruh warga negara berhak dan wajib berpartisipasi dalam upaya dan usaha Bela Negara yang diwujudkan dalam usaha-usaha pertahanan negara. Keikutsertaan Warga Negara dalam usaha Bela Negara, dapat dilakukan melalui:

- a. pendidikan wawasan kebangsaan;
- b. Pelatihan dasar militer aktif;
- c. Mengabdikan diri sebagai Tentara Nasional Indonesia; dan
- d. Pengabdian diri sesuai bidang pekerjaan/ profesi.

Di ungkapkan Menteri BUMN Erick Thohir, saat memberikan sambutan bagi calon pegawai BUMN, mengatakan *“Keberlanjutan kepemimpinan di BUMN harus berlanjut disertai adanya karakter*

AKHLAK dalam diri tiap pekerja melalui pembentukan karakter sebagai karyawan BUMN melalui Bela Negara karena, Kita tidak mau juga menjadi satu kekuatan besar tetapi jadi kekuatan yang salah arah karena tidak diiringi karakter yang baik. Kepintaran tanpa karakter akan jadi kejahatan. Kekayaan tanpa karakter akan jadi kerakusan. “

Selain Kemudian yang menjadi Hak Warga Negara dalam usaha Bela Negara dan cinta tanah air , dapat berupa:
a. mendapatkan pendidikan kewarganegaraan yang dilaksanakan melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara;
b. mendaftar sebagai calon anggota Tentara Nasional Indonesia; dan
c. mendaftar sebagai calon anggota Komponen Cadangan.

Kewajiban Warga Negara dalam usaha Bela Negara, meliputi:
a. kewajiban Warga negara Indonesia untuk ambil bagian menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebagai alat Pertahanan Negara;
b. kewajiban yang diberlakukan kepada warga negara Indonesia sebagai anggota komponen cadangan yang akan di mobilisasi dalam menghadapi berbagai ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan baik ancaman yang bersifat militer maupun ancaman hibrida.

(Modul_II_IMPLEMENTASI_BELA_NEGARA.pdf n.d.)

Secara khusus di Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, bahwa pembentukan Kader Bela Negara Desa ini, bertujuan mendukung tugas pokok dan fungsi, yakni Pembinaan Ideologi Pancasila dan upaya meningkatkan semangat Bela Negara di tingkat Desa, dan para Kader mempunyai tanggung dalam menyampaikan materi-materi Bimbingan teknis Kesadaran Bela Negara yang dilaksanakan oleh

Bidang Ideologi dan Karakter Bangsa, kepada warga masyarakat lainnya, yang dapat dilaksanakan dalam bentuk sikap dan perilaku di tengah-tengah masyarakat yang mencerminkan sikap yang mau terlibat dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, sikap yang mencerminkan semangat bela negara, maupun Bimbingan Teknis di Tingkat Desa, yang tentunya penganggaran di dukung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

Tujuan lainnya adalah mendukung fungsi kewaspadaan dini daerah dari ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan (AGHT).

Dalam hal Mendukung Kinerja Bidang Kewaspadaan Nasional, Pernyataan dukungan Tokoh Masyarakat, Pak Ust TG Burhanuddin / Tokoh Masyarakat (Ketua FKUB dan MUI Kab Sumbawa Barat, selaku mantan Kepala Bidang).

“Ini bagus, saya melihat dari Kacamata Inteligen, selaku mantan Kabid Kewaspadaan Nasional, tentunya ini akan sangat mendukung kinerja kami di lapangan, hubungan baik kami dengan Kepala Desa, Camat cukup sebenarnya mengenai info-info Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang berupa laporan bersifat resmi, sementara Dalam Konsep Deteksi Dini, butuh informan yang menyampaikan secara riil dan akurat dalam waktu yang cepat, untuk segera di tangani, yang berkaitan dengan Dunia Inteligen dan Deteksi Dini dari masalah-masalah di tengah masyarakat. “AGHT itu, harus mampu di redam sebelum muncul ke permukaan “ itulah peran Tim Koordinasi Kewaspadaan Dini.”

Dengan keberadaan Kader Bela Negara Desa ini, yang juga bertindak sebagai intelijen Desa, tentunya akan sangat mempermudah kinerja Bidang Kewaspadaan Nasional dalam mengetahui berbagai

informasi yang berkembang di Wilayah Kabupaten Sumbawa Barat, sebagai upaya deteksi dini dan mengelola isu dan konflik daerah.

Unsur utama dalam intelijen adalah, informasi intelijen, analisa strategi, potensi ancaman dan upaya pengamanan terhadap kepentingan dan keamanan nasional, yang di amanatkan oleh Undang-undang nomor 17 tahun 2011 tentang Intelijen Negara.

Strategi lainnya, dengan upaya deteksi dini dan pencegahan dini, tim deteksi dini kabupaten Sumbawa Barat sebagai perwujudan intelijen di tingkat kabupaten berperan penuh dalam mencegah, menangkal hingga menangani dan menanggulangi setiap ancaman yang mengganggu keamanan dan kepentingan nasional. Mengingat tugas pokok dan fungsi ini, sedianya Kader Bela Negara Desa, dapat bertindak sebagai Intelijen Desa yang dapat memberikan informasi kepada tim kewaspadaan dini di tingkat Kabupaten dalam rangka mengamati, menjangkau, menganalisa, potensi ancaman dan laporan masyarakat untuk dikordinasikan dan dikomunikasikan untuk pengambilan keputusan terbaik, gangguan hambatan dan tantangan serta gejala dan peristiwa bencana untuk langkah tercepat untuk penanganan tercepat secara dini dan merekomendasikan langkah-langkah antisipasinya serta sebagai bahan pengambilan keputusan pimpinan daerah.

Demikianlah Peran Kader Bela Negara Desa (KBNDes), dalam inovasi yang kami canangkan dalam semangat membangun negeri dari sisi ketahanan nasional dan kewaspadaan nasional.

Sesuai tugas yang termuat di dalam Surat Keputusan Keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 188.4.45.823 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kader Bela Negara Desa di Kabupaten Sumbawa Barat

Tahun 2022 (terlampir), adalah Menanamkan dan menumbuhkembangkan sejak dini kesadaran bela negara dimulai dari pribadi masing-masing, lingkup keluarga terdekat dan lingkungan masyarakat sehingga menjadikan karakter Bangsa Indonesia, menjadi lebih baik dan lebih kuat. Mampu menyebarkan semangat dan kesadaran bela negara kepada warga sekitar kita melalui aksi nyata dan aktualisasi nilai-nilai kesadaran bela negara di lingkungan masing-masing sehingga bermanfaat bagi warga masyarakat luas. Menumbuhkan dan mengembangkan semangat kesadaran bela negara yang dapat diaktualisasikan dalam peran dan profesi setiap warga masyarakat guna menjadikan modal sosial bangsa membangun diri menjadi bangsa yang berkedaulatan yang kuat, mandiri dan berkepribadian. Mendukung fungsi kewaspadaan dini daerah dalam mengelola isu dan konflik daerah.

Kinerja Badan Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Pasca Penerapan Kader Bela Negara Desa

Dengan penerapan kebijakan tentang pembentukan Kader Bela Negara Desa (KBNDes) sesuai dengan Surat Keputusan Bupati Sumbawa Barat nomor 188.4.45.823 Tahun 2022 tentang Pembentukan Kader Bela Negara Desa di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2022, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat, sangat terbantuan dengan kehadiran KBNDes, secara tugas dan fungsi serta tanggungjawab yang melekat telah terlaksana dengan baik. Hadirnya Kader Bela Negara desa (KBNDes) sangat mendukung pelaksanaan tugas dan tanggungjawab dalam semangat Pembinaan Ideology Pancasila. Menjadi semangat baru dalam semangat pembinaan ideology dan

upaya peningkatan semangat bela negara.

Kader Desa adalah orang kunci yang mengorganisir dan memimpin masyarakat desa berkiprah menuju pencapaian impian bersama. Kader Desa terlibat aktif pada proses belajar sosial yg dilaksanakan oleh semua lapisan warga masyarakat desa. Kader Desa bisa di libatkan dari kaum wanita dan pria pada kedudukannya yg sejajar, meliputi masyarakat desa menggunakan usia tua, kaum belia juga anak-anak.

Kader-kader ini tentunya akan berperan dalam menyampaikan misi-misi dan tanggungjawab yang melekat yang ada pada dirinya. Tentunya mereka akan berkoordinasi dengan pemerintah desa dan mengupayakan program dan kegiatan Pembinaan Ideologi Pancasila di Tingkat Desa, sebagaimana hasil wawancara dengan Kades Moteng Kecamatan Brang Rea ;

“Apa sebenarnya peran mereka (KBNDes), kita harus pastikan benar benar kader ini dapat bergerak mendukung kami, mendukung program dan kegiatan kami Pemerintah Desa dan Kesbangpol, kami siap bantu dalam hal mendukung warga kami dalam meningkatkan kesadaran bela negara dan wawasan kebangsaan secara umum, mengingat ada warga atau anak-anak muda yang kami lihat mulai kecanduan dengan budaya budaya luar, yang dapat dengan mudah mengaksesnya melalui internet saat ini. Yang berkaitan dengan warga kami, kami siap bantu melalui APBDes.”

Lebih lanjut kami, mewawancarai Kepala desa Tongo, Bapak Idham Khalid mengenai tanggapan beliau dan harapan, sehubungan dengan pembentukan Kader Bela Negara Desa (KBNDes).

“Pembinaan Ideologi Pancasila, semangat bela negara,

wawasan kebangsaan atau apa lah namanya, sekilas kami lihat adalah hal-hal yang sedikit terlupakan dalam program dan kegiatan Pemerintah Daerah, atau mungkin karena kami jauh dari Ibukota Kabupaten sehingga kegiatan semacam ini, mungkin kami agak terlupakan. Sesuatu yang baru seperti ini, harus banyak Sosialisasi kepada warga, mengingat mereka adalah Obyeknya, obyek dari program dan kegiatan. Kami menyambut baik dengan Pembentukan Kader Bela Negara Desa (KBNDes), semoga mampu mendukung upaya Kesbangpol dalam meningkatkan Cinta Tanah Air bagi warga kami, silahkan Perangkat Daerah terkait menyiapkan aturan hukum, yang mengikat kami dalam perencanaan dan penganggaran sehingga kami ada pegangan dalam penganggaran melalui APBDes”

Semangat dukungan dari Pemerintah Desa inilah, salah satu yang menjadi harapan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, semangat Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Kader Bela Negara Desa (KBNDes) terdengar gaungnya di tingkat Pemerintah Desa, sehingga ada upaya untuk Pemanfaatan Dana Desa dalam mendukung Program dan Kegiatan dimaksud.

Lebih jauh Peneliti mewawancarai Kepala Bidang Pemerintahan Desa, terkait kemungkinan Pelaksanaan Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Kader Bela Negara Desa (KBNDes) di Tingkat desa dapat masuk ke dalam Penganggaran APBDes melalui Dana Desa.

Kepala Bidang Pemdes Dinas pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Riski Syahputra, S.IP “Bahwa semua kegiatan Perangkat Daerah yang mempunyai keterkaitan dengan Desa, dalam hal penganggaran yang menggunakan Dana desa atau APBDes, harus mempunyai dasar hokum yang jelas, minimal Peraturan

Bupatinya, sehingga ada dasar kami mengganggu melalui, Terlebih lagi Dana Desa, terikat aturan tentang penggunaanya”

Kesimpulan yang dapat peneliti simpulkan dari beberapa pernyataan informan, yakni ;

1. Perangkat Daerah dalam hal ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat, dalam rangka mengharafkan dukungan Pemerintah Desa melalui Penganggaran di Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes), maka harus ada aturan hukumnya, yakni berupa Peraturan Bupati, yang di siapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Sumbawa Barat.
2. Kegiatan Bimbingan Tekhnis dan Sosialisasi Kesadaran Bela Negara di tingkat Desa ini nantinya akan membutuhkan Narasumber dari pihak pihak terkait, seperti Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, Pihak Kodim 1628 Sumbawa Barat, Kementerian Agama Kabupaten Sumbawa Barat, dan Pihak lainnya yang terkait.
3. Peningkatan kapasitas dari Aparatur Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat, untuk mendapatkan Training of trainer (ToT) yang dilaksanakan oleh Kementerian terkait, sehingga memegang lisensi dan mampu berbicara banyak dalam menyampaikan materi tentang Bela Negara dan Wawasan Kebangsaan secara umum.
4. Mengadakan studi banding ke daerah lain yang sudah melaksanakan program yang sama (best practice) tentang pelaksanaan pembinaan ideology bangsa melalui Kesadaran Bela Negara (KBN).

Dengan terbentuknya Kader Bela Negara Desa (KBNDes) yang mendukung pelaksanaan tugas dan

tanggungjawab Bidang Ideologi dan Karakter Bangsa dan Bidang Kewaspadaan Nasional Badan Kesatuan Bangsa dan politik kabupaten Sumbawa Barat dalam meningkatkan semangat Bela Negara dan pemahaman terhadap ideology Pancasila serta mendukung fungsi kewaspadaan dini Daerah, terjadi peningkatan kinerja, dengan adanya kader-kader di Desa sebagai mitra kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat. Terjadi koordinasi yang baik antara Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat dengan Pemerintah Desa terutama dalam program-program kegiatan yang bisa di laksanakan oleh Pemerintah Desa yang di dukung penuh oleh Badan Kesatuan Bangsa dan politik Kabupaten Sumbawa Barat.

E. PENUTUP

Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis dan uraian pada bagian sebelumnya, maka proses penelitian mengenai strategi peningkatan semangat bela negara implikasi terhadap pemahaman ideology Pancasila dan fungsi kewaspadaan dini daerah pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumbawa Barat, menyimpulkan bahwa:

- 1) Pembentukan Kader Bela Negara Desa, merupakan strategi dalam meningkatkan semangat bela negara yang berimplikasi terhadap pemahaman ideology Pancasila secara umum, sehingga pelaksanaan tanggungjawab yang melekat Bidang Ideologi dan Karakter Bangsa dapat berjalan dengan maksimal.
- 2) Kader Bela Negara Desa mendukung fungsi kewaspadaan dini daerah mengacu pada tugas dan tanggungjawab yang melekat dalam menjaga keamanan dan ketertiban wilayah, serta segala macam ancaman, gangguan,

hambatan dan tantangan baik yang datang dari dalam maupun dari luar yang berpotensi mengusik ketentraman dan ketertiban dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- 3) Pembentukan Kader Bela Negara Desa, sebagai strategi dalam rangka mempercepat dalam meningkatkan pemahaman ideology Pancasila di tingkat desa, sehingga diharapkan ada dukungan pemerintah desa dalam penganggaran dengan teranggarkannya melalui Dana Desa.

Saran

Peneliti menyarankan beberapa hal sebagai upaya perbaikan dari kelemahan yang ditemukan pada penelitian ini, setelah melakukan penelitian dan menarik kesimpulan, sebagai berikut:

- 1) Bagi pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diharapkan memaksimalkan peran melalui tugas dan tanggungjawab yang melekat agar meningkatkan pemahaman dan pengetahuan tentang arah kebijakan penetapan Kader Bela Negara di tingkat desa ini.
- 2) Bagi Aparatur sipil negara untuk senantiasa belajar dan memahami tugas, pokok dan fungsi yang di amanahkan sehingga kemampuan untuk berkreasi dan berinovasi senantiasa tumbuh dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.
- 3) Bagi pihak akademisi yang fokus kepada inovasi dan kebijakan publik, agar melakukan penelitian secara komprehensif, memperluas objek penelitian, menambah sumber data dan memperdalam kajian mengenai kebijakan-kebijakan kepala daerah, untuk meningkatkan kemajuan dan Inovasi di dalam pelayanan public di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1. BADANDIKLATKEMENHAN_Modul_II_IMPLEMENTASI_BELA_NEGARA_2018.Pdf.
2. Bappeda_Litbang RANHIR RPJMD 2021-2026 NEW-Converted.”
3. Bentuk dan Wujud Penerapan Sikap dan Perilaku Bela Negara”. Dalam <https://www.kemhan.go.id/pothan/2018/08/28/bentuk-dan-wujud-penerapan-sikapdan-perilaku-bela-negara.html>. Diakses 14 mei 2022
4. Budhi Pamungkas Gautama et al. 2020. “Pengembangan Desa Wisata Melalui Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat.” *BERNAS: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(4): 355–69.
5. H. Bahdin Nur Tanjung, SE., MM Drs. H. Ardial, M.Si, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, (Proposal, Skripsi, dan Tesis)* 2005. 0110
6. Harahap, Junaidi Mustapa., Muhammad Irwansyah Hasibuan dan Ronal Watrianthos. 2020. Pengaruh *Reward* dan *Punishment* (Penghargaan dan Hukuman), Koordinasi Pemerintah Daerah Terhadap Kinerja SDM Program Keluarga Harapan (PKH) di Lingkungan Dinas Sosial Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Ilmu Manajemen*. 02(01): 1-12.
7. Harahap, Hikmat. (2007). *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Bandung: Humaniora.
8. Hukum.B Setda_SK Bupati Tentang KBNDes.Pdf.
9. JIIP: JURNAL ILMIAH ILMU PEMERINTAHAN Vol.6, No. 2, 2021 DOI: 10.14710/jiip.v6i2.11475
- Analisa Kewenangan Badan Intelijen Negara (BIN) dalam Penanganan Pandemi Covid-19 Andhi Bahtiar¹, Agus Purwadianto², Vishnu Juwono³
¹ Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia
² Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia
³ Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Indonesia.
Dikirimkan: 17 Juni 2021 Direvisi: 25 September 2021 Diterbitkan: 30 September 2021
10. Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategis dan Global (SKSG) Universitas Indonesia, Jl. Salemba Raya No.4, Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10430 Email: andhi.bahtiar@ui.ac.id.
11. Karsayuda, H.M Rifqinizamy, and Rahmadi Indra Tektona. 2021. “Ketahanan Ideologi Pancasila Dalam Menghadapi Distrupsi Revolusi Industri 4.0.” *Jurnal Ketahanan Nasional* 27(1): 112.
12. Kartasasmita, G. (2009). *Pembangunan Untuk Rakyat*. Jakarta: Balai Pustaka.
13. Mengko, Diandra Megaputri. 2015. “Problematika Tugas Perbantuan TNI.” *Jurnal Keamanan Nasional* 1(2): 175–96.
14. Moleong, Lexy, J. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
15. Natamiharja, Rudi, and Kisti Artiasha. 2017. *Universitas Pertahanan*. https://www.researchgate.net/profile/Rudi_Natamiharja/publication/338763514_MUTUALISME_HUKUM_INTERNASIONAL_DAN_IN_DONESIA_DALAM_UPAYA_MENINGKATKAN_KESADARAN_BELA_N

- EGARA/links/5e2922cb92851c3aad23310/MUTUALISME-HUKUM-INTERNASIONAL-DAN-INDONESIA-DALAM-UPAYA.
16. Ningrat, Widodo Surya, Armaidly Armawi, and Djoko Soerjo. 2019. "Internalisasi Bela Negara Dalam Pembinaan Kegiatan Pemuda Purna Paskibraka Kabupaten Bandung Untuk Pembentukan Ketahanan Pribadi." *Jurnal Ketahanan Nasional* 25(1): 36.
 17. Nurjannah. 2015. Peranan Manajemen Inovasi dalam Meningkatkan Kinerja Organisasi Pendidikan. *Conference in Business, Accounting and Management*. 2(1): 27-33.
 18. Perguruan, Kontribusi, and Tinggi Dalam. 2018. "Menumbuhkan Semangat Bela Negara Di Kalangan Pelajar Smpn 02 Belitang Hilir." 3(2): 87-97.
 19. Republik Indonesia, Presiden. 2021. "Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara." *Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6a13* (048077).
 20. Salsabila Riadi, Fadhilah, and Dini Anggraeni Dewi. 2021. "Eksistensi Dan Penguatan Nilai-Nilai Ideologi Pancasila Di Masyarakat Pada Era Revolusi Industri 4.0." *Jurnal Penelitian Ilmu Humaniora* 1(6): 1-7.
 21. Sciences, Health. 2016. <https://journal.actual-insight.com/index.php/antropocene/article/view/206>.
 22. Setiawan, Mursyid, Hilal Ramdhani, and Cecep Darmawan. 2020. "Strategi Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Dalam Mewujudkan Sumber Daya Manusia Unggul." *Jurnal Pertahanan & Bela Negara* 10(3): 261.
 23. Setneg RI. 2019. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara." *Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional* (24 Oktober 2019): 2-4.
 24. Sholihatin, Endang, Kusnarto Kusnarto, and Warsiman Warsiman.
 25. 2020. "Harmonisasi Nilai-Nilai Bela Negara Dengan Sistem Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Untuk Meningkatkan Nasionalisme." *Public Administration Journal of Research* 2(2): 139-51.